

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Teori *stewardship* merupakan salah satu teori dalam akuntansi yang muncul sejalan dengan adanya perkembangan akuntansi yang merambah pada disiplin ilmu lainnya (Frankoe, Kamaludin dan Fadli, 2021). Wulandari dan Fauzihardani (2022), mengemukakan bahwa:

“Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajer menargetkan tujuan mereka bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *stewards* dan *principals* dimana *stewards* bertindak mampu menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan masyarakat dan kesuksesan organisasi. Salah satu tujuannya yaitu serapan anggaran dapat tercapai maksimal. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai alat penggerak dalam menjalankan tugasnya mengelola serta bertanggungjawab atas perkembangan daerah.”

Teori *stewardship* dapat dihubungkan dengan sektor publik karena pihak *steward* bertindak berdasarkan keinginan *principal*. Yang berarti pihak pemerintah akan melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi menggambarkan *output* yang maksimal akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak *principal* akan menilai kinerja yang dilakukan oleh *steward* sangat baik (Oktaliza, Ahyaruddin dan Putri, 2020). Teori ini menjelaskan peran pemerintah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai dalam hal ini masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Ardianne (2020) mengemukakan bahwa:

“Teori *stewardship* merupakan hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward* yang tercipta akibat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *stewardship theory* dalam penelitian ini merupakan teori yang dapat menjelaskan bagaimana pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja sesuai dengan amanah dan kepentingan *principal* atau masyarakat sehingga tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai.

### **2.1.2 Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran merupakan indikator evaluasi kinerja suatu perangkat daerah atas aspek implementasi (Harahap, Taufik dan Nurazlina, 2020). Serapan anggaran adalah kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD (Jumriani, 2018). Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius di kalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun (BPKP, 2011). Penyerapan anggaran adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui pencairan dana satuan kerja yang bisa dinilai dari tinggi dan rendahnya jumlah anggaran yang dicairkan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.

Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Apabila alokasi anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang ada dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis (BPKP, 2011). Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran (Iqbal, 2018) adalah sebagai berikut:

- a) Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.
- b) Dari segi ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam periode waktu tertentu.

### **2.1.3 Perencanaan Anggaran**

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan strategi masa depan dengan tepat sesuai dengan program, prosedur, dan metode yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Haris, 2020). Perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kegiatan anggaran yang tepat untuk jangka waktu tertentu (Yuliani, 2020). Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah tersedia (Zulaikah dan Burhany, 2019). Dengan melakukan perencanaan anggaran yang maksimal, pemerintah daerah dapat memprediksi anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan ke depannya. Apabila perencanaan dilakukan dengan tidak menyusun skala prioritas kegiatan, maka akan terjadi penumpukan penyerapan anggaran (Rerung, Karamoy dan Pontoh, 2017).

Perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara rencana yang dibuat dengan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya anggaran (Yuliani, 2020). Menurut Ramdhani dan Anisa (2017), anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam

satuan moneter atau satuan rupiah untuk periode yang akan datang baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

#### **2.1.4 Dokumen Pengadaan**

Dokumen pengadaan merupakan jenis dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pengadaan barang dan jasa, pemborongan jasa lainnya, dan dokumen pengadaan jasa konsultansi (Agus, 2016). Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dimana dokumen tersebut memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang/jasa (Aucky, 2016).

Dokumen pengadaan berpengaruh terhadap daya serap anggaran, tanpa adanya dokumen pengadaan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan sehingga akan memperlambat kegiatan program yang telah direncanakan. Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan menurut Aucky (2016) antara lain:

- a) Dokumen pengadaan disusun dan disiapkan panitia/pejabat pengadaan.
- b) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak.
- c) Perubahan dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan dimana dokumen tersebut memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

#### **2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan atau kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut dapat memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Dewi, Dwirandra dan Made, 2017). Keterampilan individu merupakan nilai tambah bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dapat dilihat dari kesesuaian pendidikannya dengan bidang

pekerjaannya selain itu juga mendapatkan pelatihan teknis secara berkala dari dunia kerja dan mengembangkan pengalamannya.

Terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia (Yuliani, 2020) yaitu:

- a) *Knowledge* (Pengetahuan)  
Informasi yang dimiliki seseorang atau individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan bidang yang dipelajarinya (tertentu), misalnya akuntansi, anggaran, statistik dan penggorganisasian.
- b) *Skill* (Kemampuan)  
Keahlian yang dimiliki oleh seorang individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Seperti standar perilaku para staf atau karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan lebih efisien.
- c) *Attitude* (Perilaku)  
Perasaan (senang dan tidak senang, suka dan tidak suka) atau reaksi/tindakan terhadap suatu rangsangan yang bersumber dari luar. Misalnya reaksi terhadap kondisi perekonomian, perasaan terhadap penurunan laba. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu berupa pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan pekerjaannya.

#### **2.1.6 Tekanan Eksternal**

Tekanan eksternal merupakan tekanan yang didapatkan dari desakan pihak luar. Tekanan eksternal adalah faktor luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap organisasi baik pada struktur dan kegiatannya yang disebabkan adanya suatu peraturan (Nugraheni, 2021). Tekanan eksternal terjadi karena adanya peraturan-peraturan yang berasal dari luar organisasi, seperti tekanan dari pemerintah pusat, gubernur, dan walikota yang bertujuan agar dapat mengatur praktik sehingga dapat berjalan dengan baik (Pratama, Abdurahim dan Sofyani, 2018).

Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang lebih baik. Kekuatan koersif yang merupakan tekanan eksternal yang diberikan pemerintah dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau

memperbaiki legitimasi (Nugraheni, 2021). Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis. Tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur dengan adanya tekanan eksternal, dapat menyebabkan praktik-praktik pada perangkat daerah yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal merupakan tuntutan yang didapatkan dari pihak luar organisasi yang disebabkan oleh suatu peraturan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akbar Sulthony (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran dengan Variabel Intervening Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	X1: Pemahaman X2: Pelatihan X3: Tekanan Eksternal X4: Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja  Y: Penyerapan Anggaran	Pemahaman dan pelatihan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
2	Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik dan	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,	X1: Perencanaan Anggaran X2: Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Nur Azlina (2020)	Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada perangkat daerah Kota Dumai)	X3: Pencatatan Administrasi X4: Kompetensi Sumber Daya Manusia  Y: Penyerapan Anggaran	Sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
3	Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019)	Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat	X1: Regulasi X2: Politik Anggaran X3: Perencanaan Anggaran X4: Sumber Daya Manusia X5: Pengadaan Barang/Jasa  Y: Penyerapan Anggaran	Regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun, politik anggaran dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
4	Jumriani (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota ParePare	X1: Dokumen Perencanaan X2: Pencatatan Administrasi X3: Sumber Daya Manusia X4: Uang Persediaan  Y: Penyerapan Anggaran	Dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, dan uang persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, namun yang paling berpengaruh adalah dokumen perencanaan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Meyulinda Aviana Elim, Deasy Susana Ndaparoka, dan Thobias Elianus David Tomasowa (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang	X1: Perencanaan Anggaran X2: Pelaksanaan Anggaran X3: Pengadaan Barang dan Jasa X4: Komitmen Manajemen X5: Lingkungan Birokrasi  Y: Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah di Kota Kupang.
6	Novrian Dandi Pratama, Ahim Abdurahim, dan Hafiez Sofyani (2018)	Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah	X1: Pemahaman X2: Pelatihan X3: Tekanan Eksternal  Y: Penyerapan Anggaran	Pemahaman, pelatihan, dan tekanan eksternal berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran kinerja. Secara simultan maupun parsial.
7	Ni Luh Putu Lestari Dewi, A.A.N.B. Dwirandra dan Made Gede Wirakusuma (2017)	Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan	X1: Perencanaan Anggaran X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X3: Komitmen Organisasi  Y : Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran berpengaruh positif, dan kompetensi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran dan mampu memperkuat kompetensi SDM pada penyerapan

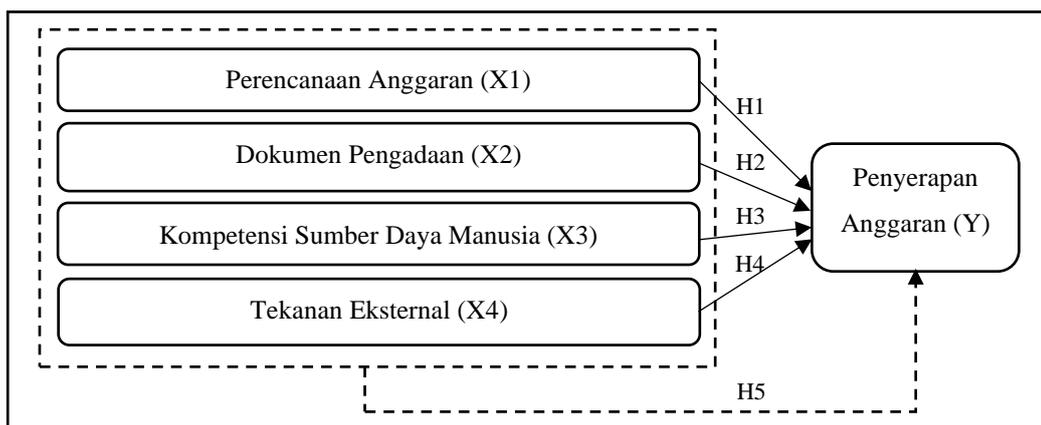
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan
8	Rahadi Nugroho dan Salman Alfarisi (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	X1: Perencanaan Anggaran X2: Pelaksanaan Anggaran X3: Sumber Daya Manusia X4: Pengadaan Barang dan Jasa X5: Masalah Koordinasi Dengan Sektor atau Instansi Lain  Y: Penyerapan Anggaran	Perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah. Sebaliknya, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
9	Syakhrial (2017)	Analisis Pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja	X1: Perencanaan Anggaran X2: Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa X3: Dokumen Pengadaan  Y: Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap progress penyerapan anggaran belanja, proses administrasi pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dan proses verifikasi dokumen pengadaan mempengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan, secara simultan perencanaan anggaran, adm. pengadaan dan dokumen juga berpengaruh secara simultan.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Monik Zarinah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah, (2016)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara	X1: Perencanaan Anggaran X2: Kualitas Sumber Daya Manusia Y: Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD, baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Sumber: Hasil penelitian terdahulu tahun 2016-2021

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka merupakan pemikiran tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang kemudian dianalisis tentang hubungan antar variabel yang diteliti (Ahyar *et al.*, 2020). Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan masalah yang diteliti maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

- > = Pengaruh secara parsial
- - -> = Pengaruh secara simultan

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2021).

### **2.4.1 Perencanaan Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk suatu kegiatan guna kepentingan masyarakat dimana penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan rencana dana belanja yang dapat digunakan secara efektif dan efisien. Perencanaan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila tahapan-tahapan yang telah dibuat dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Apabila perencanaan tidak dilakukan dengan persiapan yang matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi penyebab minimnya penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2016) menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Begitu juga dengan hasil penelitian Zarinah, Darwanis dan Abdullah (2016) dan Nugroho dan Alfarisi (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun tidak menemui masalah sehingga penyerapan anggaran berjalan dengan tepat waktu. Apabila suatu perencanaan direncanakan dan rencana tersebut direalisasikan maka anggaran dapat dikatakan terserap dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H1: Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran BPKAD Kota Palembang.**

### **2.4.2 Dokumen Pengadaan**

Dokumen pengadaan diperlukan untuk kegiatan pembelian barang dan jasa pemerintah. Dokumen pengadaan berisi pengumuman mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, serta

pertanggung jawab kegiatan pengadaan. Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 sebagai perubahan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Dokumen pengadaan sangat berpengaruh terhadap daya serap anggaran karena, tanpa adanya dokumen pengadaan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat dilakukan sehingga akan memperlambat kegiatan/program yang telah direncanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2016) menyatakan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran begitu juga dengan Aucky (2016) yang menyatakan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H2: Dokumen Pengadaan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran BPKAD Kota Palembang.**

#### **2.4.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Semakin sering seseorang melakukan suatu pekerjaan yang sama maka, semakin terampil juga seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Semakin luas dan banyak pengalaman kerja seseorang maka, semakin terampil juga pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir serta sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dewi, Dwirdanra dan Made, 2017). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap berperilaku sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara profesional, efektif, dan efisien.

Sumber daya manusia yang berkompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah dan menjadi pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan dinamis (Ramadhani dan Setiawan, 2019). Fungsi pemerintah sebagai sumber daya manusia dapat diwujudkan dalam praktiknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh

Elim et al (2018), Dewi, Dwirdanra dan Made (2017), dan Zarinah, Darwanis dan Abdullah, (2016) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran BPKAD Kota Palembang.**

#### **2.4.4 Tekanan Eksternal**

Tekanan eksternal merupakan suatu daya dari luar organisasi yang membatasi ruang gerak organisasi dalam melaksanakan tugas. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Tekanan eksternal dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintah adanya peraturan yang berasal dari luar organisasi bertujuan agar mengatur praktik sehingga dapat berjalan dengan lebih baik hal ini disebut dengan kekuatan koersif (Nugraheni, 2021). Pengaruh kekuatan koersif ini juga membuat organisasi lebih melihat ke arah pengaruh politik dibandingkan pengaruh teknis. doPengaruh politik yang mempengaruhi organisasi akan berdampak pada proses penyusunan anggaran, ketercapaian anggaran serta pada kinerja organisasi yang akan hanya bersifat formalitas guna mendapat informasi.

Nugraheni (2021) menyatakan bahwa, semakin tinggi tekanan eksternal maka semakin baik penyerapan anggaran sejalan dengan hasil penelitian itu menurut Shalikhah (2014) menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran dan penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H4: Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran BPKAD Kota Palembang.**

#### **2.4.5 Perencanaan Anggaran, Dokumen Pengadaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Tekanan Eksternal Terhadap Penyerapan Anggaran**

Berdasarkan penjabaran hipotesis diatas, perencanaan anggaran yang baik dan disusun dengan matang sesuai dengan program kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan, dan juga dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang benar dan

lengkap untuk proses pengadaan barang dan jasa, serta memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan ditempatkan pada bidang yang sesuai maka penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan. Selain itu, apabila sumber daya manusia yang ada dapat memahami pekerjaan yang telah diberikan terutama dalam hal menyusun anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran serta adanya dorongan tekanan eksternal atau pihak di luar organisasi agar penyerapan anggaran benar-benar terserap dan menghasilkan *output* yang dapat dirasakan oleh masyarakat maka akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H5: Perencanaa Anggaran, Dokumen Pengadaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran BPKAD Kota Palembang.**